

PENERAPAN *CONCORDANCE STRATEGY* DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA MENGHADAPI KEPENTINGAN *NINE DASH LINE CHINA*

Bimbi Rianda

Program Magister Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran

E-mail: bimbi18001@mail.unpad.ac.id

Yanyan Mochamad Yani

Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran

E-mail: yan2m@hotmail.com

Arfin Sudirman

Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran

E-mail: arfin.sudirman@unpad.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam mempertahankan hak berdaulat ZEE di Perairan Natuna Utara dari kepentingan *Nine Dash Line* China. Proses analisa strategi kebijakan luar negeri Indonesia tersebut menggunakan pendekatan strategi kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh John Lovell. Mendukung proses penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, telaah kepustakaan yang didapatkan melalui buku, media daring, maupun dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menghadapi kepentingan China dengan gagasan *nine dash line* China yang mulai menyentuh Perairan Natuna Utara, pemerintah Indonesia menyadari bahwa kapasitas negaranya lebih inferior dibandingkan dengan China, sehingga strategi yang dilakukan berorientasi pada *concordance strategy* dengan cara kerjasama bilateral melalui BRI, dan kerjasama multilateral ASEAN melalui AOIP yang menguntungkan Indonesia.

Kata Kunci : Kebijakan Luar Negeri Indonesia, China, ZEE, *Nine Dash Line*, *Concordance Strategy*

PENDAHULUAN

Keberadaan klaim China secara sepihak terhadap Perairan Natuna yang secara hukum laut internasional merupakan kedaulatan ZEE Indonesia menghadirkan penolakan dari pemerintah Indonesia. Alasan pemerintah Indonesia sangat jelas dan berdasar, karena gagasan *Nine Dash Line* yang dinyatakan oleh China telah melanggar hukum laut internasional, yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*. Atas dasar tersebut pula Indonesia tidak menyatakan diri sebagai *claimant state*, karena Perairan Natuna merupakan bagian yang utuh dalam kedaulatan teritorial Indonesia, sehingga Indonesia tidak perlu memperebutkannya lagi karena sudah dijustifikasi oleh UNCLOS 1982, melainkan yang Indonesia lakukan adalah untuk

mempertahankan keamanan maritim Perairan Natuna Utara sebagai bentuk perlindungan terhadap keutuhan NKRI, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan yang juga merupakan hak dari pemerintah Indonesia untuk melindungi Zona Ekonomi Eksklusif nasionalnya. Jika dilihat dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, maka dapat dipetakan bahwa kepentingan Indonesia terhadap Perairan Natuna di Laut China Selatan adalah kepentingan atas keutuhan wilayah, stabilitas wilayah dan kawasan, serta kepentingan ekonomi.

Dasar hukum yang menjadi landasan Indonesia dalam mempersalahkan China terhadap gagasan *Nine Dash Line*nya adalah berdasarkan pada Pasal 47 Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 mengenai Garis Pangkal Kepulauan yang

menyatakan bahwa “penarikan garis dari kepulauan Natuna ke arah utara (ke perairan Natuna Utara) sejauh 200 NM sehingga Perairan Natuna Utara tersebut merupakan ZEE Indonesia.” Pernyataan hukum ini seharusnya berbunyi sangat jelas untuk melawan China dengan klaim *Nine Dash Line* yang meliputi Perairan Natuna Utara milik Indonesia, namun sayangnya keberadaan China yang superior dibandingkan dengan Indonesia yang masih inferior membuat terdapat ketimpangan dalam menghadapi China. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kasus pelanggaran yang dilakukan oleh China di wilayah Perairan Natuna Utara.

Salah satunya adalah ketika kapal *Coast Guard* China melakukan aksi penangkapan ikan secara tidak sah atau *illegal fishing* pada tanggal 19 Maret 2016. Aksi tersebut diketahui oleh kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia yang pada saat itu tengah melakukan patrol di wilayah Natuna Utara, sehingga kapal *Coast Guard* China ditarik keluar dari ZEE Indonesia oleh kapal Kementerian KKP. Tentu tindakan yang dilakukan oleh China melalui *Coast Guard*nya tersebut telah melanggar hukum internasional dan telah menunjukkan sikap tidak menghormati otoritas pemerintah Indonesia di wilayah yang merupakan bagian dari hak berdaulat ZEE Indonesia. Dengan menelaah urgensi permasalahan di atas maka dapat dirumuskan satu pertanyaan pokok yaitu bagaimana bentuk kebijakan luar negeri Indonesia menghadapi kepentingan *nine dash line* China di Perairan Natuna Utara.

METODE

Penulisan jurnal ini menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan menjelaskan strategi Indonesia menghadapi kepentingan *nine dash line* China di Perairan Natuna Utara. Tipe kualitatif dalam penelitian Ilmu Hubungan Internasional mempelajari fenomena dan

aktor serta untuk memahami proses dan fenomena yang terjadi di dunia internasional (Bakry, 2016). Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis memaparkan bagaimana bentuk strategi konkordan yang dilakukan oleh Indonesia sebagai unit analisis dalam kajian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan telaah pustaka (*library research*). Wawancara dilakukan secara virtual pada beberapa narasumber yang relevan dan memiliki tingkat kecukupan dan kualitas data yang mumpuni. Telaah pustaka merupakan metode pengumpulan data-data terkait yang berasal dari buku, jurnal, dokumen, laporan, artikel, atau surat kabar, baik daring maupun luring. Penulis menggunakan metode penulisan deduktif, yaitu menggambarkan permasalahan secara umum dan kemudian menarik kesimpulan. Adapun focus waktu penelitian pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Analisis kajian yang digunakan adalah menggunakan konsep kebijakan luar negeri dari John Lovell yang secara spesifik menjelaskan bahwa setiap negara ketika mengembangkan kebijakan luar negeri dituntut untuk berusaha mengimplementasikan tipe strategi yang sesuai dengan keputusan strategi lawan serta mempertimbangkan kemampuan sendiri. Melanjutkan penjelasan tersebut, Lovell menggunakan 4 tipologi strategi untuk membantu analisa terhadap strategi yang digunakan sebuah negara dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, yang terdiri dari, *leadership strategy*, *confrontation strategy*, *concordance strategy*, dan *accommodative strategy*. Lebih lanjut lagi, untuk mempermudah membedakan keempat tipologi strategi tersebut baik secara definisi maupun orientasi penggunaannya melalui skema berikut ini: (p. 190).

Tipologi Strategi Politik Luar Negeri Menurut Lovell



Sumber: John Lovell, "Foreign Policy in Perspektive" dalam Mochtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional-Disilin dan Metodologi*. LPP3Es, Jakarta, 1990, hal. 190.

Menurut Lovell, munculnya konsep negara superior dan negara inferior dijelaskan dengan melihat posisi tawar (*bargaining position*). Negara yang berada dalam posisi inferior akan cenderung memiliki tipologi akomodasi dan konkordan. Berkaitan dengan konsep negara kuat dan negara lemah yang dikemukakan oleh John P. Lovell maka dalam posisi ini Indonesia berada pada pihak yang lemah karena berkaitan dengan posisi tawar dengan China dalam menyikapi persoalan ini pemerintah Indonesia kemudian menjalankan berbagai strategi/kebijakan yang berorientasi kepada *concordance strategy*. Implementasi diplomasi dan promosi luar negeri memiliki peranan penting bagi Indonesia sebagai wujud sikap pro-aktif bahwa pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya sangat fokus terhadap isu *Nine Dash Line* yang secara tidak langsung menyentuh Perairan Natuna Utara yang merupakan bagian dari wilayah hak berdaulat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Concordance strategy merupakan suatu strategi yang mengacu pada kepentingan yang saling menguntungkan. Hal ini ditandai dengan adanya hubungan

yang harmonis antara negara superior dengan negara inferior guna menghindari potensi munculnya konflik antar negara. Pola strategi konkordansi melihat strategi yang dikeluarkan oleh negara superior merupakan strategi yang berpotensi untuk mendukung kepentingan nasional negara inferior. Adapun penerepan strtegi konkordan yang dilakukan oleh Indonesia yaitu

Diplomasi Indonesia dalam Menjaga Relasi dengan China melalui ASEAN Outlook On Indo-Pacific (AOIP)

Dalam rangka mewujudkan kepentingan nasionalnya, Indonesia mencetuskan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP). Letak LCS yang berada di kawasan Asia Tenggara, membuat ASEAN menjadi salah satu pemeran utama dalam memimpin keamanan untuk tercapainya perdamaian dan stabilitas regional. Maka dari itu, AOIP hadir sebagai bentuk kesepakatan negara-negara ASEAN untuk menghadapi tantangan, termasuk untuk menjaga keamanan LCS. ("Final, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific," 2019, p. 3). AOIP berisi ambisi Indonesia untuk terciptanya kerjasama maritim di negara-negara kawasan Indo-Pasifik.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan gagasan ASEAN *Outlook on Indo-Pacific* (AOIP), yang dilihat berdasarkan potensi di kawasan regionalnya. Gagasan mengenai AOIP secara umum disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-India tahun 2018 (CNN Indonesia, 26/01/2018). Konsep AOIP yang digagas oleh Pemerintah Indonesia pada dasarnya merupakan tanggapan terhadap tantangan yang berkembang dan berasal dari kawasan eksternal ASEAN. Dalam pemaparan konsep yang diajukan Indonesia, ASEAN dijelaskan sebagai organisasi sentral yang selama ini berada di kawasan Asia Pasifik dan Samudra Hindia.

Gagasan AOIP yang diusung oleh Indonesia memiliki karakter yang kuat dalam menggambarkan kawasan regionalnya, tanpa menghilangkan sentralitas ASEAN. Indonesia menggagas *Outlook* ini sehingga dapat digunakan oleh ASEAN dan Indonesia. Hal ini juga memiliki keterkaitan dengan posisi ASEAN di Indonesia. Indonesia dengan politik luar negeri yang bebas aktif ini menjadikan ASEAN sebagai landasan penting di dalam politik luar negerinya, sehingga Indonesia bisa memajukan kepentingan nasionalnya lewat ASEAN (Agastia&Perwita, 2015: 33).

Indonesia berpandangan bahwa terdapat peluang di kawasan ASEAN sebagai ruang yang dapat membantu Indonesia dalam memperluas cakupan kerja samanya. Keberhasilan Indonesia membawa isu maritim dalam agenda ASEAN juga merupakan langkah awal yang membantu Indonesia membuka jalan demi mencapai PMD. Isu maritim bagi Indonesia saat ini merupakan ancaman yang memberikan dampak pada aspek penting terkait permasalahan yang mengancam ekonomi, pertahanan dan keamanan Indonesia seperti permasalahan perbatasan, isu perompak dan *illegal fishing*, serta perubahan geopolitik yang mengancam sentralitas kawasan menjadi

skala utama dalam pemetaan kepentingan Indonesia yang digagas sebagai PMD (Anwar, 2020: 113).

Platform ASEAN selama ini memang dikenal sebagai referensi kebijakan luar negeri Indonesia serta menjadi penentu pemetaan kepentingan nasional Indonesia (Agastia & Perwita, 2015: 33). Tidak jarang Indonesia membuat kebijakan yang mengikutsertakan ASEAN dalam pencapaiannya. Dalam hal ini, pembentukan AOIP merupakan jembatan bagi Indonesia untuk menegaskan kondisi di kawasan. Selain untuk memberikan kuasa terhadap ASEAN sebagai wadah kerja sama di Asia Tenggara, serta menjaga stabilitas di kawasan. Indonesia memiliki kepentingan yang juga harus dicapai dengan menggunakan AOIP, berkorelasi dengan PMD yang ingin dicapai oleh Indonesia, yang kemudian memberikan Indonesia pandangan dan sikap lain untuk membantu menyelesaikan permasalahannya di luar perbatasan Indonesia (*outward looking*) (Yani&Montratama, 2015: 36).

Gagasan Indonesia tersebut menghendaki terbangunnya arsitektur kawasan yang dapat lebih memupuk rasa saling percaya (*confidence-building*) dan menumbuhkembangkan dialog (*habit of dialogue*). Restrukturisasi kawasan ini akan berorientasi pada prinsip keterbukaan, inklusivitas, dan menghormati hukum internasional yang berlaku. Indonesia mengusulkan konsep ini akan menjadi dasar kerja sama melalui pendekatan *building block* baik secara bilateral dan plurilateral dengan memanfaatkan mekanisme yang sudah ada.

Pada kerangka kerja sama AOIP Indonesia memasukkan kepentingan ekonomi yang ingin dicapainya. Secara khusus berkaitan dengan visi Poros Maritim Dunia, Presiden Joko Widodo memetakan ekonomi maritim sebagai salah satu pengembangan yang harus dilakukan. Hal ini tentu menuntut Indonesia untuk tidak hanya membenahi infrastruktur di

dalam negeri, namun perlu juga pembenahan dalam keamanan untuk dapat menjamin pelayaran yang ada di perairan Indonesia tidak mengalami ancaman. Nawacita Jokowi menginginkan Indonesia yang berperan lebih dalam kawasan regional dan Indo-Pacific dikarenakan, kawasan ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis. Maka dari itu Indonesia menggagas terbentuknya AOIP. Melalui kerjasama yang dibentuk melalui AOIP, peluang terhadap terbukanya pemenuhan investasi secara berkelanjutan akan semakin besar.

Sebagai negara yang memiliki peran cukup sentral di ASEAN dan sekaligus negara yang menginisiasi penyelesaian konflik Laut China Selatan secara kolektif, pemerintah Indonesia memiliki peran secara aktif agar konflik di Laut China Selatan perlahan de-eskalasi. Melalui pembentukan AOIP yang diinisiasi oleh Indonesia, Indonesia ingin mengekskansi pengaruh Indonesia yang dapat mendorong negara-negara ASEAN untuk menyetujui *framework* AOIP sebagai instrument yang menjembatani kepentingan negara-negara ASEAN dengan China dalam ruang lingkup kerjasama.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat menggerakkan negara-negara anggota ASEAN yang juga merupakan *claimant states*, untuk melihat penyelesaian konflik secara kolektif merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan ketika berhadapan dengan China. Pendekatan regional ASEAN melalui AOIP, dijadikan Indonesia sebagai upaya dalam mencapai penyelesaian konflik.

Diplomasi Indonesia sebagai bentuk *concordance strategy* melalui AOIP berpeluang untuk memaksimalkan pemanfaatan kerjasama regional di kawasan Asia Pasifik. Berbagai tantangan yang dapat mendistraksi stabilitas kerjasama regional yang salah satunya dapat bersumber dari aksi-aksi konfrontasi China, semakin mempertegas bahwa AOIP harus diarahkan untuk memperhatikan

perkembangan dinamika konflik Laut China Selatan. Peran Indonesia sebagai inisiator AOIP berperan penting untuk memperkuat hubungan regional di kawasan Asia Pasifik melalui empat prioritas kerjasama AOIP yang sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yaitu kerjasama maritim, *Sustainable Development Goals* (SDG's), konektivitas, dan ekonomi.

Posisi Indonesia terhadap Kebijakan *Belt and Road Initiative* China

Keikutsertaan Indonesia dalam BRI selain bertujuan untuk menguntungkan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional sebagai Poros Maritim Dunia, serta keuntungan ekonomi lainnya, tetapi juga untuk mempererat hubungan kerjasama Indonesia dengan China. Dalam kerjasama BRI sektor yang menjadi orientasi utama adalah kerjasama dalam pembangunan infrastruktur dengan memberikan investasi kepada negara mitra. Sehingga kapabilitas dari kebijakan China dan Indonesia dilihat dari *soft power* yaitu ekonomi dengan menggunakan nilai investasi, volume perdagangan dan pendapatan negara. Untuk kerja sama Indonesia dan Tiongkok, yang mana kerja sama tersebut salah satunya terdapat pada gagasan *Belt and Road Initiative*. Indonesia menjadi salah satu mitra kerja sama tersebut yang memiliki kepentingan untuk membangun kerja sama dengan Tiongkok yang semakin baik.

Jika dianalisa lebih dalam, keikutsertaan Indonesia dalam BRI juga merupakan bentuk perwujudan Indonesia terhadap Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas-aktif, melalui keterjalinan kerjasama dengan China di berbagai bidang, Indonesia berupaya untuk terus menjaga hubungan diplomatik dan ekonomi yang baik bersama China. Peran BRI membantu Indonesia untuk menerima kolaborasi yang diberikan China kepada Indonesia berupa bantuan pembangunan infrastruktur darat dan juga laut. Lebih dari

pada itu pembentukan BRI menahan China untuk selalu mengedepankan kepentingan nasionalnya di kawasan Asia Pasifik, karena dalam BRI terdapat dua yaitu *Silk Road Economic Belt* (SREB) yang berfokus kepada kerjasama kawasan *Eurasia dan Maritime Silk Road* (MSR) yang berfokus pada kerjasama kawasan maritim khususnya Asia Tenggara. Atas pertimbangan tersebut maka China bersama dengan ASEAN pada tahun 2013 berhasil melakukan upaya negosiasi mengenai kode etik atau *Code of Conduct* sebagai respon terhadap konflik Laut Cina Selatan.

Keikutsertaan Indonesia dalam kebijakan China dalam gagasan bernama BRI merupakan kebijakan yang menguntungkan bagi Indonesia, walaupun posisi Indonesia sebagai negara inferior. Serta disisi lain juga menghasilkan keuntungan bagi China yang mendapatkan kepercayaan dari negara-negara di Asia Tenggara yang tentu menjadi peluang bagi China untuk memperbesar *power*nya di kawasan Asia. Dengan kata lain strategi politik luar negeri Indonesia terhadap *Belt and Road Initiative* termasuk dalam *concordance strategy*. Sebagaimana penjelasan *concordance strategy* secara praktis merupakan kebijakan negara superior yang menguntungkan bagi negara inferior. Melalui *concordance strategy* politik luar negeri Indonesia bertujuan untuk menjaga hubungan baik Indonesia dan Tiongkok dengan kerja sama BRI.

KESIMPULAN

Respon Indonesia terhadap masalah Blok-Natuna yang diklaim oleh China secara umum tidak berlebihan, namun menunjukkan langkah-langkah diplomatis di segala bidang. Langkah-langkah tersebut ditunjukkan dengan pendekatan strategi yang telah dikonsepkan oleh Lovell, dan kemudian diuraikan dalam penelitian ini. Strategi-strategi tersebut ditinjau dua variabel, yaitu: *pertama*, adalah persepsi negara sendiri terhadap kebijakan negara lain. *Kedua*, adalah

estimasi kapabilitas negara sendiri terhadap negara lain. persepsi tersebut akan memperlihatkan kebijakan negara lain adalah kebijakan yang menguntungkan baru negara sendiri atau merugikan negara sendiri. *Power* dalam pemahaman John P. Lovell memperlihatkan posisi negara apakah negara inferior atau superior. Hal tersebut kemudian membentuk salah satu tipe strategi politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi China yaitu menggunakan, *concordance strategy*.

Hubungan kerjasama Indonesia dan China, baik secara bilateral melalui BRI, maupun yang sifatnya multilateral dalam kerangka AOIP adalah bentuk kerjasama yang menghasilkan keuntungan bagi Indonesia, karena hal ini dapat digunakan sebagai suatu kendaraan bagi Indonesia mewujudkan kepentingan nasionalnya menjadi Poros Maritim Dunia. Kapabilitas Indonesia yang berada pada posisi inferior dibandingkan dengan China, akan membuat Indonesia akan cenderung memilih cara-cara kerjasama untuk menjaga hubungan baik dengan China. Maka dari itu berbagai bentuk upaya kerjasama yang Indonesia lakukan dengan China menjadi bagian dari penggunaan tipologi *concordance strategy*, karena Indonesia menganggap bahwa kebijakan atau tindakan China membawa nilai keuntungan terhadap kepentingan nasionalnya.

Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, suatu negara perlu mempertimbangkan kapabilitasnya dan menganalisa kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh negara lain, serta memetakan posisi *power* negara sendiri untuk selanjutnya memilih tipologi strategi seperti apa yang relevan untuk diterapkan. Dalam hal ini, jika melihat strategi Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negerinya untuk mempertahankan kedaulatan teritorialnya di Perairan Natuna Utara dari kepentingan *Nine Dash Line*

China, maka Indonesia cenderung menggunakan *concordance strategy*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, J.W. 2010. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications
- Lovel, John P. 1970. *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc
- P. Anthonius Sitepu. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Jurnal

- Andika, MT, Aisyah, AN. 2017. "Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan?". *Jurnal Indonesian Perspective*. Volume 2 Nomor 2: 85-185
- Ari, Yuli Sulityani, dkk. 2021. "Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo". *Politica*. Volume 12 Nomor 1
- Atnan, Rio Riyadi, dan Diah Apriani Atika Sari. 2019. "Pemutakhiran Peta Di Kawasan Laut Natuna Utara Sebagai Langkah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia". *Belli Ac Pacis*. Volume 5 Nomor 1
- Boy, Anugerah. 2021. "Penguatan Strategi Penangkalan Dalam Merespons Aksi Koersif Cina di Laut Natuna Utara".
- Cai, P. 2017, "Understanding China's Belt and Road Initiative". *Lowy Institute for International Policy*. Volume 2 Nomor 10
- Gilang, Langgeng Pangestu, dkk. 2021. "Strategi Indonesia Mewujudkan ASEAN Outlook On Indo-Pacific (AOIP) Untuk Menciptakan Stabilitas Di Kawasan Indo-Pasifik" *Proyeksi*. Volume 26 Nomor 1

M. A. Vinsensio Dugis. 2015. "Memahami Peningkatan Kehadiran China di Pasifik Selatan: Perspektif Realisme Strategik". *Global & Strategis*. Volume 9 Nomor 1

- Marsetio. 2013. "Membangun Maritime Domain Awareness Guna Mendukung Keamanan Maritim dalam Perspektif TNI Angkatan Laut". *Jurnal Pertahanan*. Volume 12 Nomor 3
- Sambogo, Alief. 2018. "Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Prespektif Hukum Internasional". *Jurist-Diction*. Volume 1 Desember 2: 381-396
- Supriyanto, Ristian Alriandi. 2015. "Indonesia's Natuna Islands; Next Flashpoint in the South China Sea?". *Journal for RSIS Commentary*. Number 033
- Suryadinata, Leo. 2016. "Did the Natuna Incident SHAKE Indonesia-China Relations?". *Journal Perspective*. Number 19

Rujukan Elektronik

- Ambassador Xie Feng. 2019. "Why Belt and Road and Global Maritime Fulcrum Cooperation Benefits both China and Indonesia?". China Embassy. Berita on-line. Diakses melalui < <http://id.chinaembassy.org>>, pada 14 Desember 2021
- Atikah, Ishmah Winahyu. 2021. "Tindakan Tiongkok Buat Situasi Memanas di Laut China Selatan". Media Indonesia. Berita on-line. Diakses melalui < <https://mediaindonesia.com/internasional/395483/tindakan-tiongkok-buat-situasi-memanas-di-laut-china-selatan>>, pada 13 Januari 2022
- Bahri, Saeful Ismail. 2017. "Tiongkok Demands Indonesia Rescind Decision to Rename Part of South Tiongkok Sea". Channel News Asia. Berita on-line. Diakses melalui < (<http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/Tiongkok-demands-indonesia-rescind-decision-to-rename-part-of-south->

9179992?view=DEFAULT>, pada 13 Januari 2022

- Beech, Hannah. 2016. "Just Where Exactly Did China Get the South China Sea Nine-Dash Line From?". Time. Berita on-line. Diakses melalui <
<https://time.com/4412191/nine-dash-line-9-south-china-sea/>>, pada 10 Januari 2021, pukul 19.00 WIB
- Christin, Lidya Sinaga. 2011. "Menilik Alur Laut Kepulauan Indonesia". LIPI. Artikel on-line. Diakses melalui <
<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/413-menilikalur-laut-kepulauan-indonesia-ii>>, pada 13 Januari 2022
- G. Natalia. 2010. "U.S. Arts and Cultural Diplomacy: Post-Cold War Decline and the Twenty-First Century Debate". The Journal of Arts Management, Law, And Society. E-Journal on-line. Diakses melalui, <
https://www.researchgate.net/publication/224952975_US_Arts_and_Cultural_Diplomacy_Post-Cold_War_Decline_and_the_Twenty-First_Century_Debate>, pada 8 Januari 2021